

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya)*. UI Press. Jakarta
- Barinbing Simpul, RE. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Pusat Kegiatan Reformasi. Jakarta
- Bryan. A Garner. 1979. *Black's Law Dictionary with The Pronunciations fifth Edition*. West Publishing & Co. USA
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2009. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Antar Lembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional KRHN. Jakarta
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma. Yogyakarta
- Makmur Keliat. 2008. *Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik*. Program Magister Studi Pertahanan-ITB dan Imparsial. Jakarta

Momo Kelana.1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*. PTIK. Jakarta

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum dan Demokrasi &JudicialReview*. UIIPress. Yogyakarta

Patrialis Akbar. 2011. *Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika. Jakarta

Priyo Budi Santoso. 1997. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Pudi Rahardi.2014. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika. Surabaya

R. Abdussalam.1997. *Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta

Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan GoodGovernance*. LaksbangMediatama. Surabaya

Sadjijono.2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang. Surabaya

Soerjono Soekanto. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang

Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

Soerjono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*.Rineka Cipta. Jakarta

SudiknoMerto Kusumo.2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Lyberty. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

C. Website, tesis, koran dan lain-lain

Bahaya Isu Sara di Pilkada Serentak dan Potensi Munculnya Radikalisme, sumber dari merdeka.com, diupload (02 Februari 2018), <http://kesbangpol.kemendagri.go.id>.

Ika Devianti. Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 jendral Polisi Jadi Plt Gubernur. Diakses melalui liputan6.com, pada 2 Agustus 2018

Moh. Nadir. Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju Jendral Polisi Jadi Pejabat Gubernur. Diakses melalui kompas.com, pada 4 Agustus 2018, pukul 19.30 WIB

Novrieza Rahmi, Memaknai Irisan Perppu dan UU Darurat, (04 September 2017), < <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59ad2f9c2a944/memaknai-irisan-perppu-dan-uu-darurat>>.

Saldi isra. *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*. 2015. Pada <https://www.saldiisra.web.id/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri>